

Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan Kembali Raih Opini WTP



BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 secara langsung kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kegiatan dilaksanakan di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak atau social distancing dan menggunakan masker sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi penyebaran wabah Covid-19. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan diawali dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) kemudian Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, Eydu Oktain Panjaitan menyerahkan LHP kepada Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Husin Sogot Simatupang, dan kepada Bupati Tapanuli Selatan, H. Dolly Pasaribu.

Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah pemerintah daerah pertama yang menyerahkan LKPD unaudited TA 2020 tepat pada hari Kamis, 11 Februari 2021. Meskipun dalam suasana wabah Covid-19, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaannya. Pemeriksaan Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan opini, dimana opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas kewajaran penyajian laporan keuangan dengan berdasarkan kepada Kesesuaian penyajian dengan SAP, Efektivitas SPI, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Kecukupan pengungkapan. Berdasarkan hal-hal tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kepala Perwakilan dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang kembali meraih opini WTP dan juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan agar segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat 3 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Bupati Tapanuli Selatan menyampaikan ucapan terimakasih atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkab Tapanuli Selatan yang turut melakukan berbagai upaya perbaikan tata kelola pemerintah berjalan dengan baik. "Saya berharap pencapaian ini bisa menjadi penyemangat untuk terus melakukan berbagai upaya peningkatan, untuk terus meningkatkan akuntabilitas keuangan di masa yang akan datang," tambahnya.

Setelah penyerahan selesai dilaksanakan, Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan ikut berpartisipasi dalam Pencanaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebagai wilayah kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan papan pencanangan ZI sebagai wujud dukungan dari stakeholder (salah satunya Kabupaten Tapanuli Selatan).



Bupati Tapanuli Selatan sedang menandatangani wall of participant & commitment



Horas Medan

PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Edisi Triwulan II 2021

BPK Telah Serahkan Seluruh LHP LKPD TA 2020

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK mendapat amanat untuk menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah laporan keuangan diterima. Hari ini, 28 Mei 2021, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera

Dari Redaksi

Pada edisi Triwulan II Tahun 2021 kali ini, BPK Sumut melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara. BPK Sumut juga melaksanakan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tahun 2021

Dewan Redaksi

Pengarah : Eydu Oktain Panjaitan
 Penanggungjawab : Tongku Badulla H
 Ketua : Mulya Widyopati
 Pelaksana:
 Venny, M. Amin, Ahmad Nur, Heryando Pasaribu, Tetap Purba, Ratna Tri Darmayanti, Jumakhir, M. Zamroni, Rizqi Anggraeni, Dar Agnema, Rifla Anwar, Grace Patricia Sianipar.

Utara telah menyerahkan LHP atas LKPD Tahun 2020 kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan DPRD Kabupaten Nias Selatan. Pemkab Nias Selatan adalah Pemkab ke-34 yang LHP nya telah diserahkan. Dengan demikian, seluruh LHP atas LKPD Tahun 2020 telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah terkait secara tepat waktu.

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Ketepatan waktu penyampaian LHP merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian kualitas mutu suatu laporan hasil pemeriksaan

No	Entitas yang Diperiksa	Tanggal Penyerahan LKPD dari Pemda ke Perwakilan BPK	Tanggal Penyerahan LHP kepada Pemda	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	Opini
1	Kabupaten Tapanuli Selatan	11 Februari 2021	09 April 2021	tepat waktu	WTP
2	Kabupaten Serdang Bedagai	16 Februari 2021	15 April 2021	tepat waktu	WTP
3	Kabupaten Samsir	26 Februari 2021	16 April 2021	tepat waktu	WTP
4	Kabupaten Toba Samsir	17 Februari 2021	16 April 2021	tepat waktu	WTP
5	Kabupaten Humbang Hasundutan	02 Maret 2021	28 April 2021	tepat waktu	WTP
6	Kabupaten Padang Lawas Utara	01 Maret 2021	29 April 2021	tepat waktu	WDP
7	Kota Gunungsitoli	08 Maret 2021	29 April 2021	tepat waktu	WTP
8	Kota Sibolga	09 Maret 2021	05 Mei 2021	tepat waktu	WTP
9	Kota Binjai	22 Maret 2021	10 Mei 2021	tepat waktu	WTP
10	Kabupaten Deli Serdang	22 Maret 2021	10 Mei 2021	tepat waktu	WTP
11	Kabupaten Padang Lawas	25 Maret 2021	10 Mei 2021	tepat waktu	WTP
12	Kabupaten Simalungun	22 Maret 2021	11 Mei 2021	tepat waktu	WDP
13	Kabupaten Labuhanbatu	18 Maret 2021	11 Mei 2021	tepat waktu	WDP
14	Kabupaten Dairi	26 Maret 2021	11 Mei 2021	tepat waktu	WTP
15	Kabupaten Batu Bara	24 Maret 2021	11 Mei 2021	tepat waktu	WTP
16	Kota Padangsidimpuan	22 Maret 2021	19 Mei 2021	tepat waktu	WTP
17	Kabupaten Asahan	22 Maret 2021	19 Mei 2021	tepat waktu	WTP
18	Kabupaten Mandailing Natal	22 Maret 2021	19 Mei 2021	tepat waktu	WDP
19	Kabupaten Karo	31 Maret 2021	21 Mei 2021	tepat waktu	WTP
20	Kabupaten Labuhanbatu Utara	29 Maret 2021	21 Mei 2021	tepat waktu	WTP
21	Kabupaten Pakpak Bharat	29 Maret 2021	21 Mei 2021	tepat waktu	WTP
22	Provinsi Sumatera Utara	26 Maret 2021	24 Mei 2021	tepat waktu	WTP
23	Kota Pematangsiantar	30 Maret 2021	25 Mei 2021	tepat waktu	WDP
24	Kabupaten Langkat	29 Maret 2021	25 Mei 2021	tepat waktu	WTP
25	Kota Tebing Tinggi	30 Maret 2021	25 Mei 2021	tepat waktu	WTP
26	Kota Medan	29 Maret 2021	27 Mei 2021	tepat waktu	WTP
27	Kabupaten Nias Barat	30 Maret 2021	27 Mei 2021	tepat waktu	WDP
28	Kabupaten Tapanuli Utara	31 Maret 2021	27 Mei 2021	tepat waktu	WTP
29	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	31 Maret 2021	27 Mei 2021	tepat waktu	WTP
30	Kabupaten Nias	30 Maret 2021	27 Mei 2021	tepat waktu	WDP
31	Kabupaten Tapanuli Tengah	30 Maret 2021	28 Mei 2021	tepat waktu	WTP
32	Kota Tanjungbalai	30 Maret 2021	28 Mei 2021	tepat waktu	WDP
33	Kabupaten Nias Utara	31 Maret 2021	28 Mei 2021	tepat waktu	WDP
34	Kabupaten Nias Selatan	31 Maret 2021	28 Mei 2021	tepat waktu	WDP

Pembangunan Zona Integritas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara



Bupati Nias Barat sedang menandatangani wall of participant & commitment

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional, sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi yaitu (1) Birokrasi yang Bersih dari KKN dan Akuntabel, (2) Birokrasi yang Efektif dan Efisien, (3) Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah

penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tahun 2021. Pencanangan ini dilakukan dengan penandatanganan Wall of Participation and Commitment baik oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara maupun para stakeholder. Para Pemerintah Daerah dan DPRD selaku stakeholder turut serta menandatangani Wall of Participation and Commitment sebagai wujud dukungan pembangunan ZI BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.



Ketua DPRD Kab Dairi sedang menandatangani wall of participant & commitment

Dua Puluh Pemerintah Daerah Sukses Pertahankan Opini WTP



Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemkab Batu Bara TA 2020

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada dua puluh pemerintah daerah di Sumatera Utara. Opini WTP ini diberikan kepada Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangannya dinilai telah menyajikan laporan keuangan secara wajar dan terhindar dari kesalahan penyajian yang bersifat material.

Dengan pemberian opini WTP, dua puluh pemerintah daerah tersebut berhasil mempertahankan capaian opini WTP yang telah diraih pada tahun sebelumnya. Atas capaian ini, Kepala Perwakilan menyampaikan apresiasi dan berharap opini WTP dapat beriringan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

No	Entitas	WTP Berturut Turut (kali)	No	Entitas	WTP Berturut Turut (kali)
1	Kab Labuhanbatu Selatan	8	11	Kab Batu Bara	3
2	Prov Sumatera Utara	7	12	Kab Deli Serdang	3
3	Kab Dairi	7	13	Kab Serdang Bedagai	3
4	Kab Tapanuli Selatan	7	14	Kota Gunung Sitoli	3
5	Kab Tapanuli Utara	7	15	Kota Sibolga	3
6	Kab Humbang Hasundutan	5	16	Kota Tebingtinggi	3
7	Kab Toba Samosir	5	17	Kab Karo	2
8	Kota Binjai	5	18	Kab Labuhanbatu Utara	2
9	Kab Asahan	4	19	Kab Langkat	2
10	Kab Samosir	4	20	Kab Padang Lawas	2

Kepala Perwakilan BPK Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan menyatakan bahwa pemeriksaan BPK pada masa pandemi Covid-19 dilaksanakan melalui penerapan protokol kesehatan secara ketat serta tetap berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). "Dengan demikian, hasil pemeriksaan BPK benar-benar memberikan keyakinan yang memadai terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah," jelasnya saat menyampaikan sambutan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD TA 2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK mencatat beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Meski demikian, temuan-temuan tersebut dinilai tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. "Temuan tersebut di antaranya, penatausahaan Aset Tetap belum tertib atau belum memadai," ungkap Kepala Perwakilan.

"Kami mengingatkan agar pemerintah daerah dapat menindaklanjuti temuan-temuan yang telah kami tuangkan dalam LHP," kata Kepala Perwakilan. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2020 diselenggarakan secara tatap muka di Auditorium BPK Sumatera Utara dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ketat, termasuk pembatasan jumlah peserta.

Selain menyerahkan LHP LKPD, dalam acara ini Kepala Perwakilan juga menyampaikan bahwa BPK Sumatera Utara sedang mengupayakan peningkatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Kepala Perwakilan mengajak para Kepala Daerah dan Ketua DPRD untuk memberikan dukungan pembangunan ZI melalui penandatanganan Wall of Participation and Commitment. Kepala Perwakilan juga mengharapkan kerja sama dari seluruh pimpinan DPRD dan jajaran pemerintah daerah sebagai stakeholder BPK untuk memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka peningkatan kualitas fungsi pelayanan BPK.